

RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. PULAU BANGKA KEL. AIR ITAM PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala ridha, berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RKRA) tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimana merupakan pengelompokan dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen jangka menengah daerah (RPJMD).

Rencana kerja tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan merupakan bahan usulan dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk usulan kegiatan tahun anggaran 2025. Sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik dan tepat hasilnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dapat ikut dalam mendukung Arah Rencana Pembangunan Daerah dan Komitorian Kelautan dan Perikanan RI.

Perencanaan menjadi poin penting dalam suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan akurat, sehingga mimpinya untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud. Rencana 2025 ini juga berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk dapat semakin memperkuat kerjasama sesama unsur tim yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah laporan rencana ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pemangku kebijakan dan pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2024

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIK 19780808 200001 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
SAS I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	6
SAS II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	31
2.3 Isu-isu Penting Peningkatan Tugas dan Fungsi PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
SAS III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	67
SAS IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	69
SAS V PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.22.01	RECAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENDRA PERANGKAT DAERAH 1/2 TAHUN 2023 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELTUNG	33
Tabel T-C.23	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELTUNG	35
Tabel T-C.24	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELTUNG	40
Tabel T-C.25	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PENANGGUL KEPENTINGAN TAHUN 2024 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELTUNG	88
Tabel T-C.26	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamalkan kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun.

Sementara itu, secara umum pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD (Perangkat Daerah) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana PD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku, kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Muatanbang tahunan yang diselaraskan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ini menyusun Rencana Kerja untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang akan datang. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya memprioritaskan dan mengalokasikan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terbunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada semakin besarnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamalkan

pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, melalui upaya peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Upaya peningkatan kualitas tersebut diwujudkan dalam bentuk pengujian *testing paper* ke daerah, peningkatan besaran dan formulasi dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian dana APBD meliputi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dana APBD Provinsi termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang kolektif dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk membantu daerah dalam mencapai komandir, khususnya dalam membangun kolektif dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kolektif dan perikanan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang melingkai baik dari segi kuantitas maupun diversitas sehingga disebut sebagai wilayah maritim dan kepulauan yang memiliki peran strategis untuk menjadi *prime mover* pembangunan daerah. Potensi yang besar ini harus didukung oleh pengelolaan anggaran, baik APBD maupun APBD dan didukung dengan manajemen pelaksanaan yang baik.

Meningkatkan pentingnya peranan sektor kolektif dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka harus diawali dari proses perencanaan kegiatan dan penganggaran yang matang. Selanjutnya diikuti dengan proses pelaksanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwujudkan dengan melaksanakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas didampingi Sekretaris Dinas dan dihadiri dengan seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD dan staf lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencanan yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Rencana Kerja Peringkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja (renja) tahun 2025 disusun secara paralel dengan penyusunan APBD 2025 dan berpedoman pada Rencana 2025 – 2028 Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2028 sebagai pengganti RPMD 2017-2022. Hal serupa dilakukan sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, maka pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan masa 2023 – 2028. Dalam penyusunan dokumen perencanaan di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengakomodir Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Kepmendagri terbaru yakni Kepmendagri Nomor 350-3559 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.2-1017 tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendagri Nomor 350-3559 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kota dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan prinsip penyusunan Renja Dinas Kota dan Perikanan yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kota dan Perikanan;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Dinas Kota dan Perikanan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Dinas Kota dan Perikanan; dan
4. Penyelesaian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan proses penyusunan Renja meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Penetapan Penyusunan;
- b. Perumusan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. menupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dan penjabaran dari tujuan dan arahan kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berikutnya.

3.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah (Jumlahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Serat Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0000 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.1.15.9-1017 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0000 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2013 (Jumlahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Serat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 15 Seri 2).

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah menjabarkan Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2028 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang meliputi rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta sumber pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah :

- 1) Sebagai pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2025;
- 2) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memahami arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

1.2 Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disusun dengan sistematisa sebagai berikut:

SAS : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPDP, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Terdapat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Terdapat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja

Terdapat uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

SAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencitra Perangkat Daerah

Terdapat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 yaitu Tahun 2023) dan pencapaian capaian tahun berjalan (tahun n-1 yaitu Tahun 2024)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RKPD dan SPJ, maupun terhadap IKK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan renja PD dan capaian Rencitra PD pada tahun 2024, juga membahas analisa kinerja pelayanan PD serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, disamping itu memuat juga review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini memuat Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan/Stakeholder maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

SAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terdapat rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diarahkan dengan sasaran terget Minsda Kelautan Perangkat Daerah.

SAS IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 2025

Terdapat penjelasan tentang uraian garis besar mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- (1) Jumlah program dan jumlah kegiatan
- (2) Difat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terlokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
- (3) Total kebutuhan dana/pegu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

SAS V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari rencana kerja 2025 ini, memuat uraian penutup dari penentuan renja 2025 ini.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2024 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebagai perantara. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra Perangkat Daerah (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan. Sehingga Perangkat Daerah dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Secara umum capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahun 2023 maupun tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terdapat rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp39.674.739.419,00 dengan komposisi anggaran Unit Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp35.584.926.544,00, Unit UPTD Balai Pemulaan sebesar Rp5.721.048.500,00 dan Unit UPTD Laboratorium Pembiakan dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp438.764.739.419,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2023, anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Rp51.779.379.880,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp12.109.640.166,00 atau 30,53% dengan komposisi anggaran untuk Unit Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp46.316.340.987,00, Unit UPTD Balai Pemulaan sebesar Rp6.622.411.000,00,00 sedangkan untuk Unit UPTD Laboratorium Pembiakan dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp89.128.883,00.

Dari Pagu perubahan tersebut di atas, maka dapat dilihat komposisi belanja berupa :

1. Belanja Operasi sebesar Rp37.135.660.713,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp14.135.254.868,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.999.425.905,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp14.664.713.892,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.664.713.707,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rp4.214.100.000,00 dan belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi sebesar Rp786.660.185,00.

Penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp46.547.931.353,00 (empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atau 89,90% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh persen). Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini

WORLDWIDE FINANCIAL SUMMARY 2022

CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Line	Year						Description of Financial Statement Item	Accounting Method or Basis of Accounting	Consolidated 2022 Balance Sheet as of Dec 31, 2022	Change from 2021 Balance Sheet as of Dec 31, 2021	Original Balance Sheet as of Dec 31, 2021	Change from 2020 Balance Sheet as of Dec 31, 2020	Original Balance Sheet as of Dec 31, 2020
	1	2	3	4	5	6							
							Assets and Liabilities						
							Assets						
							Current Assets						
							Accounts Receivable						
							Inventory						
							Prepaid Expenses						
							Other Current Assets						
							Non-Current Assets						
							Property, Plant, and Equipment						
							Intangible Assets						
							Other Non-Current Assets						
							Liabilities						
							Current Liabilities						
							Accounts Payable						
							Short-Term Debt						
							Other Current Liabilities						
							Non-Current Liabilities						
							Long-Term Debt						
							Other Non-Current Liabilities						
							Equity						
							Common Stock						
							Retained Earnings						
							Other Equity						

[illegible]

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

WORLDWIDE VOTING SYSTEMS | 2018
SUSTAINABILITY AND COMMUNITY

[illegible]

[illegible]

WOLFGANG STORCK, *SPRINGER* | 2018
KUNSTSTOFFE UND VERBUNDEN

[illegible]

Year	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABULAS
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN KEMENTERIAN KEMAHANTRIAN
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN KEMENTERIAN KEMAHANTRIAN

No	Kategori	Jenis Kegiatan	Masa Pelaksanaan	Kegiatan					Anggaran			Sumber Anggaran			Catatan
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	
1.	Manajemen	Manajemen													
1.1.	Manajemen	Manajemen													
1.2.	Manajemen	Manajemen													
1.3.	Manajemen	Manajemen													
1.4.	Manajemen	Manajemen													
1.5.	Manajemen	Manajemen													
1.6.	Manajemen	Manajemen													
1.7.	Manajemen	Manajemen													
1.8.	Manajemen	Manajemen													
1.9.	Manajemen	Manajemen													
1.10.	Manajemen	Manajemen													
1.11.	Manajemen	Manajemen													
1.12.	Manajemen	Manajemen													
1.13.	Manajemen	Manajemen													
1.14.	Manajemen	Manajemen													
1.15.	Manajemen	Manajemen													
1.16.	Manajemen	Manajemen													
1.17.	Manajemen	Manajemen													
1.18.	Manajemen	Manajemen													
1.19.	Manajemen	Manajemen													
1.20.	Manajemen	Manajemen													
1.21.	Manajemen	Manajemen													
1.22.	Manajemen	Manajemen													
1.23.	Manajemen	Manajemen													
1.24.	Manajemen	Manajemen													
1.25.	Manajemen	Manajemen													
1.26.	Manajemen	Manajemen													
1.27.	Manajemen	Manajemen													
1.28.	Manajemen	Manajemen													
1.29.	Manajemen	Manajemen													
1.30.	Manajemen	Manajemen													
1.31.	Manajemen	Manajemen													
1.32.	Manajemen	Manajemen													
1.33.	Manajemen	Manajemen													
1.34.	Manajemen	Manajemen													
1.35.	Manajemen	Manajemen													
1.36.	Manajemen	Manajemen													
1.37.	Manajemen	Manajemen													
1.38.	Manajemen	Manajemen													
1.39.	Manajemen	Manajemen													
1.40.	Manajemen	Manajemen													
1.41.	Manajemen	Manajemen													
1.42.	Manajemen	Manajemen													
1.43.	Manajemen	Manajemen													
1.44.	Manajemen	Manajemen													
1.45.	Manajemen	Manajemen													
1.46.	Manajemen	Manajemen													
1.47.	Manajemen	Manajemen													
1.48.	Manajemen	Manajemen													
1.49.	Manajemen	Manajemen													
1.50.	Manajemen	Manajemen													
1.51.	Manajemen	Manajemen													
1.52.	Manajemen	Manajemen													
1.53.	Manajemen	Manajemen													
1.54.	Manajemen	Manajemen													
1.55.	Manajemen	Manajemen													
1.56.	Manajemen	Manajemen													
1.57.	Manajemen	Manajemen													
1.58.	Manajemen	Manajemen													
1.59.	Manajemen	Manajemen													
1.60.	Manajemen	Manajemen													
1.61.	Manajemen	Manajemen													
1.62.	Manajemen	Manajemen													
1.63.	Manajemen	Manajemen													
1.64.	Manajemen	Manajemen													
1.65.	Manajemen	Manajemen													
1.66.	Manajemen	Manajemen													
1.67.	Manajemen	Manajemen													
1.68.	Manajemen	Manajemen													
1.69.	Manajemen	Manajemen													
1.70.	Manajemen	Manajemen													
1.71.	Manajemen	Manajemen													
1.72.	Manajemen	Manajemen													
1.73.	Manajemen	Manajemen													
1.74.	Manajemen	Manajemen													
1.75.	Manajemen	Manajemen													
1.76.	Manajemen	Manajemen													
1.77.	Manajemen	Manajemen													
1.78.	Manajemen	Manajemen													
1.79.	Manajemen	Manajemen													
1.80.	Manajemen	Manajemen													
1.81.	Manajemen	Manajemen													
1.82.	Manajemen	Manajemen													
1.83.	Manajemen	Manajemen													
1.84.	Manajemen	Manajemen													
1.85.	Manajemen	Manajemen													
1.86.	Manajemen	Manajemen													
1.87.	Manajemen	Manajemen													
1.88.	Manajemen	Manajemen													
1.89.	Manajemen	Manajemen													
1.90.	Manajemen	Manajemen													
1.91.	Manajemen	Manajemen													
1.92.	Manajemen	Manajemen													
1.93.	Manajemen	Manajemen													
1.94.	Manajemen	Manajemen													
1.95.	Manajemen	Manajemen													
1.96.	Manajemen	Manajemen													
1.97.	Manajemen	Manajemen													
1.98.	Manajemen	Manajemen													
1.99.	Manajemen	Manajemen													
1.100.	Manajemen	Manajemen													

Pembangunan produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.780 ton menjadi 222.880,22 ton pada tahun 2019 dan 222.880,22 ton pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 228.202 ton. Pada Tahun 2022 produksi perikanan tangkap menjadi 222.082 Ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan produksi menjadi 228.480 Ton.

Dalam sektor perikanan tangkap selama periode 2017-2023, laju pertumbuhan tertinggi portonya terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,58 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2019 dengan capaian sebesar minus 4,3 persen. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,00 persen dan kembali menurun menjadi 1,00 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat kembali sebesar 0,72% dan pada tahun 2023 produksi meningkat 1,00%.

Produksi perikanan budidaya, pada tahun 2016 tercatat sebesar 5.840,22 ton turun menjadi 7.150,88 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.184,18 dan pada tahun 2021 sebesar 9.511,118 ton. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya menjadi sebesar 8.184 ton, dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 9.144 ton. Produksi terbesar terjadi pada Tahun 2022 yakni 11.185 ton dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10.580 ton.

Selama periode 2017-2023 laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi produksi perikanan budidaya terjadi di tahun 2016, dengan capaian 182,8 persen. Pada Tahun 2017 dan 2018 terjadi kontraksi laju pertumbuhan sebesar -12,48 persen dan - 22,45 persen. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 14,17 persen dan di tahun 2021 meningkat menjadi 22,00 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 22,10% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 7,04%.

Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai output. Secara garis besarnya pengolahan dan pemasaran terdapat di 7 (tujuh) kabupaten/kota baik yang berupa Unit Pengolahan Ikan (UPI), coldstorage, pabrik es dan rumah makan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarakat ataupun korporasi.

Selama periode 2016-2023 pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan cukup mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 276,4 5 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan, dimana pertumbuhan hanya sebesar minus 87,22 persen. Kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan masih minus 2,81 persen, pada tahun 2020 pertumbuhan masih minus

1,80 persen dan di tahun 2021 pertumbuhan meningkat menjadi 28,15 %. Pada tahun 2022 pertumbuhan hanya 0,23% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 26,87%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D) dan diubah oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan tugas-tugas khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat di bidang Kelautan dan Perikanan.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dipersonalisasi dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikendalikan dalam pemerintahan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 2027 – 2032, beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan masih berpengaruh terhadap aktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan adalah:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Pemmasalahan

Laju pertumbuhan PDRB dari sub sektor perikanan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terjadi kontraksi sebesar -3,24 persen namun pada tahun 2018 terjadi kenaikan pertumbuhan mencapai 9,10 persen. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga laju pertumbuhan sebesar 5,79 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 pertumbuhan mencapai 9,85 persen merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2017-2021 yang kemudian pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 5,04 persen dan pada tahun 2022 kembali menurun hingga minus 3,59.

Walaupun pertumbuhan PDRB berfluktuasi namun pertumbuhan ekonomi sektor perikanan cukup baik, namun masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan Pelabuhan perikanan;
- b. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan hasil perikanan;
- c. Masih rendahnya pengembangan produk perikanan segar, masih banyak produk segar dan beku;
- d. Masih rendahnya kegiatan pelaku usaha dalam penyediaan data dan informasi produksi sektor perikanan;
- e. Masih rendahnya kegiatan hilirisasi produk dalam rangka meningkatkan nilai jual produk perikanan.

Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perekonomian di sektor perikanan tangkap dengan segera melengkapi dengan fasilitas airpax yang lengkap serta kolaborasi yang baik.
- b. Hilirisasi produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk.

Peluang

Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Percepatan hilirisasi produk perikanan
-
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mematuhi peraturan

Pemmasalahan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan program yang memiliki output berupa pemertaaan pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan grafik pertumbuhan kuantitas pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan pada periode 2020 – 2022 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kuantitas pelaku usaha sebanyak 11% (tidak mencapai target) dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun awal dimana usaha tambak udang mulai meningkat eksistensinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari pelaku usaha tambak udang belum memiliki dokumen perizinan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pada tahun 2020 dilakukan pembinaan terhadap kopada pelaku usaha budidaya tambak udang yang ada pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain pelaku usaha budidaya perikanan, juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan), pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan serta pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Akan tetapi, nilai laju pertumbuhan kuantitas terhadap bobroge pelaku usaha tersebut tidak begitu signifikan. Pada Tahun 2022 persentase kuantitas mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, ini disebabkan semakin maraknya pelaku usaha untuk melengkapi dokumen perizinan di unit usahanya.

Walaupun kuantitas pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan meningkat namun masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. Belum semua pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang sama atas kuantitas terhadap peraturan perundang-undangan;

Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pas Pengawasan di Bobroge titik Pelabuhan Perikanan (PPP) Muara Sungai Seturus sebagai Hemo Saso, PPI Sadai, PPI Mangger/Gantung;
- b. Memperkuat SDM Pengawasan
- c. Mengoptimalkan armada pengawasan yang ada disertai dengan menambah jumlah ABK kapal sesuai dengan jumlah armada yang ada.

Peluang

Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada para pelaku usaha di setiap sentra pelaku usaha secara rutin.

- b. Pembinaan dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha perikanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Masih belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan.

Permasalahan

- a. Kabupaten/Kota/Provinsi masih berjalan sendiri-sendiri dalam pembangunan kelautan dan perikanan
- b. Komoditas unggulan setiap Kabupaten/Kota belum muncul
- c. Kegiatan Budidaya ikan belum dalam satu Kawasan terintegrasi
- d. Saliir banir ikan lokal masih sangat tergantung dengan QAC untuk pembenihan
- e. Banyak Tambak labuh dalam kondisi rusak berat butuh sinergi semua pihak untuk dapat membangun kembali, sehingga meningkatkan geliat perikanan di setiap lokasi tambak labuh.

Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan komoditas unggulan setiap Kabupaten/Kota;
- b. Mengusulkan kegiatan budidaya suatu komoditas dalam satu Kawasan;
- c. Pelaksanaan Polahtuan Perikanan harus segera dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pelaku usaha;

Peluang

Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan hilirisasi produk perikanan masih menjadi peluang sebagai salah satu komoditas ekspor;
2. Penguatan Polahtuan Perikanan sebagai mitra ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPFD

Telaahan terhadap rancangan awal RPFD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikator berdasarkan rancangan RPFD Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2023. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, telah atau belum tercapai sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai urusan Dinas Kelautan dan Perikanan. Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam pada Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melakukan sinkronisasi terhadap urusan terkait, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Rencana sebelumnya. Review dari hasil analisa dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Secara lengkap review terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut.

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

REKAPITULASI KURAS (PUSKAS) 2020
REKAPITULASI KURAS (PUSKAS) 2020

Kode, Nama					Kategori Program						Kategori Program						Total KURAS
					Kategori Program		Kategori Program	Kategori Program	Kategori Program	Kategori Program	Kategori Program		Kategori Program	Kategori Program	Kategori Program		
					1	2					3	4				5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	10	10	100		Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
7	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
8	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
9	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
10	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
11	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
12	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
13	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
14	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
15	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
16	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
17	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
18	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
19	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
20	10	10	100	100	Program KURAS (PUSKAS) 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

RENCANA KERJA (RKW) 2020
Unit pelaksana kerja (UPK)

No. Urut					Kategori 1 (K1)					Kategori 2 (K2)					Total K1 + K2
					Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	10	10	100	1000	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 4: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 5: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 6: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 7: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 8: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 9: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 10: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	10000
2	10	10	100	1000	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 4: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 5: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 6: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 7: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 8: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 9: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 10: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	10000
3	10	10	100	1000	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 4: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 5: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 6: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 7: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 8: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 9: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	Indikator Kinerja Utama (IKU) 10: Jumlah Produk yang dihasilkan per bulan	10000

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

Proj. No.					Project Description					Financial Summary					Status		
					Project Name		Start Date	End Date	Total Budget	Total Actual	Project Name		Start Date	End Date		Total Budget	Total Actual
					Project Name	Project Name											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
2	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
3	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
4	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
5	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
6	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
7	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
8	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
9	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			
10	01	01	1.00	01	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00	Project Name	01/01/2020	01/01/2021	1.00	0.00			

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

Proj. No.					Activity Description					Financial Summary					Total Cost
					Activity Name	Unit	Quantity	Unit Price	Subtotal	Activity Name	Unit	Quantity	Unit Price	Subtotal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
2	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
3	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
4	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
5	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
6	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
7	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
8	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
9	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	
10	10	10	1.00	100	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	Construction of New Warehouse	Sq. Feet	1000	100	100000	

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA
JEST NAJLEPSZĄ NA PRZEMIAŁA

[illegible]

RENCANA KERJA (RKW) 2020
REKAM KLINIS DAN PENUNJANG

KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA	KELOMPOK KARYA
Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA
Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA
Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA	Revisi RENCANA KARYA

• **Marketing ethics + current**

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA SIĘ
WŁAŚCIWIE W PRZEMIAŁ

Sl. No.	Project Name	Project Type	Project Status	Project Description	Project Location	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (Rs. Lakhs)	Project Actual Cost (Rs. Lakhs)	Project Completion %	Project Remarks
1	Construction of 1000 sq. ft. house	Residential	Completed	Construction of 1000 sq. ft. house with all amenities.	Plot No. 10, Sector 10, Gurgaon	10/01/2018	10/01/2018	10.00	10.00	100%	Completed on time and within budget.
2	Construction of 2000 sq. ft. house	Residential	In Progress	Construction of 2000 sq. ft. house with all amenities.	Plot No. 20, Sector 20, Gurgaon	10/01/2018	10/01/2018	20.00	15.00	75%	Completed on time and within budget.
3	Construction of 3000 sq. ft. house	Residential	Not Started	Construction of 3000 sq. ft. house with all amenities.	Plot No. 30, Sector 30, Gurgaon	10/01/2018	10/01/2018	30.00	0.00	0%	Not started yet.

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA SIĘ
WŁAŚCIWIE W PRZEMIAŁ

**RENCANA KERJA, PEMBAKUAN, DAN
KENDARAAN KEMAHIRAN DAN PERUSAHAAN**

Sl. No.	Project Name	Project Type	Project Status	Project Description	Project Location	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (Rs. Lakhs)	Project Cost (Rs. Lakhs)	Project Profit (Rs. Lakhs)	Project ROI (%)	Project Risk	Project Impact
1	Project A	Construction	Completed	Construction of a new building for the company.	Project A Location	2020-01-01	2020-12-31	100	90	10	10%	Low	High
2	Project B	Software Development	In Progress	Development of a new software application.	Project B Location	2021-01-01	2021-12-31	50	45	5	10%	Medium	Medium
3	Project C	Marketing Campaign	Completed	Marketing campaign for a new product.	Project C Location	2022-01-01	2022-12-31	20	18	2	10%	Low	Low
4	Project D	Research and Development	On Hold	Research and development of a new technology.	Project D Location	2023-01-01	2023-12-31	30	30	0	0%	High	High

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA SIĘ
WŁAŚCIWIE W PRZEMIAŁ

[illegible]

[illegible][illegible]

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA SIĘ
WŁAŚCIWIE W PRZEMIAŁ

REKLAMA, KTORA PRZEMIAŁA SIĘ
WŁAŚCIWIE W PRZEMIAŁ

**RENCANA KERJA, PEMBAKUAN, DAN
KENDARAAN KEMAHIRAN DAN PEMERINTAH**

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT, (PENDING) 2008
 2008-01-01 10:00 AM EST

[illegible]

№	Проблем (problem statement)	Услов	Решение (solution)	Сложность (complexity)	Время
1	2	3	4	5	6
1	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
2	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
3	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
4	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
5	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
6	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
7	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
8	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
9	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		
10	Найти сумму чисел от 1 до n	Вход: n	Вывод: сумма чисел от 1 до n		

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT (PREPARED BY THE
JOINT CHIEFS OF STAFF AND THE SECRETARY OF DEFENSE)

[illegible]

RENCANA KERJA (RKW) 2020
REKAM KLINIS DAN PATOLOGI

No	Kategori Kegiatan/Kegiatan	Lokasi	Waktu/Kegiatan	Berkas/Output	Catatan
1	Melakukan 1 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	1	1	1
2	Melakukan 2 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	2	2	2
3	Melakukan 3 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	3	3	3
4	Melakukan 4 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	4	4	4
5	Melakukan 5 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	5	5	5
6	Melakukan 6 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	6	6	6
7	Melakukan 7 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	7	7	7
8	Melakukan 8 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	8	8	8
9	Melakukan 9 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	9	9	9
10	Melakukan 10 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	10	10	10
11	Melakukan 11 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	11	11	11
12	Melakukan 12 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	12	12	12
13	Melakukan 13 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	13	13	13
14	Melakukan 14 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	14	14	14
15	Melakukan 15 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	15	15	15
16	Melakukan 16 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	16	16	16
17	Melakukan 17 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	17	17	17
18	Melakukan 18 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	18	18	18
19	Melakukan 19 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	19	19	19
20	Melakukan 20 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	20	20	20
21	Melakukan 21 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	21	21	21
22	Melakukan 22 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	22	22	22
23	Melakukan 23 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	23	23	23
24	Melakukan 24 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	24	24	24
25	Melakukan 25 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	25	25	25
26	Melakukan 26 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	26	26	26
27	Melakukan 27 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	27	27	27
28	Melakukan 28 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	28	28	28
29	Melakukan 29 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	29	29	29
30	Melakukan 30 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	30	30	30
31	Melakukan 31 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	31	31	31
32	Melakukan 32 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	32	32	32
33	Melakukan 33 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	33	33	33
34	Melakukan 34 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	34	34	34
35	Melakukan 35 di bagian Rekam Medis dan Patologi	RUMAH SAKIT	35	35	35

RENCANA KERJA (RUMAH) 2020
RENCANA KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

No	Kegiatan yang akan dilakukan	Waktu	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Referensi
1	2	3	4	5	6
1.	Kegiatan awal: Mengucapkan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila.		Latihan membaca puisi tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".		
	Kegiatan inti: Mengamati gambar dan mendengarkan audio tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".	10.00 - 11.00		1. Mendengar	
	Kegiatan inti: Mengamati gambar dan mendengarkan audio tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".	10.00 - 11.00		1. Mendengar	
	Kegiatan inti: Mengamati gambar dan mendengarkan audio tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".	10.00 - 11.00		1. Mendengar	
	Kegiatan akhir: Menyimpulkan dan berdoa.				
2.	Kegiatan awal: Mengucapkan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila.	10.00 - 11.00	Latihan membaca puisi tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".		
	Kegiatan inti: Mengamati gambar dan mendengarkan audio tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".	10.00 - 11.00	Latihan membaca puisi tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".		
	Kegiatan inti: Mengamati gambar dan mendengarkan audio tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".	10.00 - 11.00	Latihan membaca puisi tentang "Mendengar dan Menyampaikan Informasi".		
	Kegiatan akhir: Menyimpulkan dan berdoa.	10.00 - 11.00			

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana 2023-2028 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2028, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023-2028 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Arah kebijakan umum Nasional dalam RPJMN 2023-2028 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan;
3. Mempertajam pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyajian Landasan Pembangunan yang Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
7. Mengembangkan dan Memertajakan Pembangunan Daerah.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023-2024 dituangkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional, yakni SDG, sektor unggulan, dan wilayah. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang perjalanannya dilaksanakan Komitorian Kelautan Perikanan dengan pendekatan fungsionalis proses industri kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, serta peran KKP dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pangan dimana ikan merupakan sumber protein hewani yang monevordasikan bangsa. Pendekatan wilayah dilaksanakan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Pembangunan kelautan dan perikanan akan turut menggiatkan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2023-2028, aspek pembangunan tel laut nasional, yang akan dilaksanakan melalui pengombangan pelabuhan perikanan dan sinkronisasi sistem distribusi hasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dan sinergi lintas sektor dan sinergi pusat-daerah.

Dukungan KKP terhadap agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2023-2028:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas & berkeadilan
 - Peningkatan pengelolaan perikanan, perikanan dan koleutan;
 - Mempertahankan komitmen pelaksanaan target SDGs ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water);
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil;
 - Industrialisasi;
 - Penguatan riset dan inovasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
 - Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang terdistribusi pada sentra-sentra hilirisasi perikanan dan perikanan di kawasan Pondsasi Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Koleutan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP). Pada tahun 2025 wilayah 12 SKPT yaitu Natuna, Sabalik, Moraka, Saumlaki, Sabang, Dumai Timur, Rata Nida, Montensi, Moroti, Taleud, Moe, Blak, dan Tirika.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang koleutan dan perikanan;
 - Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Makan Ikan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - Perlindungan dan penguatan kolaborasi masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - Konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun perairan;
 - Perlindungan koridoran pesisir dan sektor koleutan;
 - Pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankem dan Transformasi Pelayanan Publik
 - Penguatan keamanan laut;
 - Pembangunan dan operasional armada TSCC.

Selanjutnya dalam hal penguatan pembangunan Nasional 2020-2024, KEP akan melakukan berbagai hal antara lain:

1. Sustainable Development Goals (SDG's)
 - KEP akan mempertahankan komitmen pelaksanaan target TPD nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water);
 - KEP juga mendukung pencapaian target TPD nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), dan TPD nomor 13, yaitu Penguatan Perubahan Iklim (Climate Action).

2. Gender

- diadopsi untuk meniadakan kesetaraan dan kesetaraan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

3. Model Sosial Budaya

- berorientasi dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital

- merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Pada tahun 2023 – 2024 KKP melalui rencana kerjanya menstepkan 5 Kebijakan implementasi kebijakan ekonomi biru bangsa:

1. Penambahan luas Kawasan Konservasi Laut

Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduktif O₂.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota

Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan

3. Pengembangan budidaya laut, pasang dan darat secara berkelanjutan

Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan

4. Pengelolaan dan pengawasan pasang dan pulau-pulau kecil

Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pasang dan pulau-pulau kecil

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan

Menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

Prioritas Daerah 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini diuraikan dalam 2 (dua) hal yakni :

a. Prioritas Pembangunan Utama, terdiri dari:

- Pembangunan ekonomi
- Pembangunan lingkungan
- Pembangunan SDM dan
- Pembangunan Domestik

h. Prioritas Pembangunan Pendukung, terdiri dari:

- Pembangunan Wilayah
- Penguatan Pondapetan Masyarakat
- Pembangunan Pemerintahan.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2019-2024 dan strategi pembangunan daerah dalam RPD 2019-2024 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka terdapat 2 (dua) arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Peningkatan sarana pra-sarana produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan potensi pondapetan daerah Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas SDM Pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan Produktifitas, Kualitas/Value dan Daya Saing Produk Perikanan
3. Pengembangan SDM, Sarana dan prasarana dalam rangka membina, Mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta kegiatan usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Ml
4. Pengembangan, Penerapan/Pelaksanaan dan Evaluasi Prosedur Standar Operasional Pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat umumnya.Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dijabarkan tujuan dan sasaran rencana kerja pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap;

Untuk memenuhi target indikator kinerja berupa "Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap", maka sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Penguasaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;

Untuk memenuhi target indikator kinerja berupa "Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya", maka sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Penguasaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

3. Meningkatkan Produksi pengolahan hasil perikanan;

Untuk memenuhi target indikator kinerja berupa "Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan", maka sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program Penguasaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

4. Meningkatkan Jumlah Jasa Kelautan yang dapat difasilitasi (akses);

Untuk memenuhi target indikator kinerja berupa "Peningkatan Jenis Jasa Kelautan yang difasilitasi", maka sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Kelautan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DKP).

Untuk memenuhi target indikator kinerja berupa "Nilai RS Perangkat Daerah", maka sasaran ini didukung oleh Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dituntut berpedoman pada Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dimana masih terdapat 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan serta 78 (tujuh puluh enam) Sub Kegiatan di Dinas. Pagu Anggaran yang diutuskan pada RENSTRA sebesar Rp51.604.750.000,00 dan Pagu Indikatif yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bengkulu untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dan telah dibagi melalui rapat penyusunan RENJA ke semua program/kegiatan dan Sub kegiatan sebesar Rp44.337.892.848,00. Pagu hasil verifikasi ranya tidak berubah tetapi mengalami penyusutan disebabkan program dan menambah kegiatan bantuan komersial. Dan menjelang penutupan Keuangan Akhir APBD Provinsi Kepulauan Bengkulu Bengkulu kembali dilakukan penyusutan pada belanja pegawai berupa pengurangan pagu gaji dan tunjangan ASN dialokasikan menjadi hanya untuk 3 (tiga) bulan, sehingga pagu RENJA Akhir menjadi hanya sebesar Rp43.008.213.850,00. Berikut program yang dilaksanakan pada RENJA tahun 2025 :

A. UNIT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Peningkatan urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi sebesar Rp19.516.525.829,00, terdiri belanja pegawai sebesar Rp14.429.008.315, belanja modal sebesar Rp506.736.000,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp4.180.889.013,00. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 23 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dan menjelang penutupan Keuangan Akhir APBD Provinsi Kepulauan Bengkulu Bengkulu kembali dilakukan penyusutan pada belanja pegawai berupa pengurangan pagu gaji dan tunjangan ASN dialokasikan menjadi hanya untuk 3 (tiga) bulan, sehingga pagu belanja pegawai hanya sebesar Rp11.596.327.555,00 dan total anggaran program menjadi Rp16.585.944.568,00;
2. Program Pengelolaan Kelautan, Perairan dan Pulau-pulau Kecil. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program sebesar Rp2.237.804.000,00. Mengakomodir 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp25.000.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.209.804.000,00 dimana Rp1.000.000.000,00 diperuntukkan untuk bantuan komersial.
3. Program Pengembangan perikanan Tangkap. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp11.431.371.870,00. Program ini Mengakomodir 3 (tiga) kegiatan dan 7

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Jepuh) Sub Kegiatan. Terdiri dari Solenja Model Rp3.118.000.000,00 dan Solenja Model Rp9.303.371.379,00.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp3.677.627.894,00. Mengakomodir 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh). Dari pagu tersebut sepenuhnya diponruktukan untuk bantuan ke Masyarakat, berupa bantuan Bahan Kombe (Ariang Apung (Drum, Waring, Bahan KIR), Benih dan Pakan Kompu, Benih Sewel Bintang, Kelap Putih dan Komang Drah, Benur dan Pakan UDang Vanamo, Benih Kopting Bekau dan Misan Pakan.
5. Program Penguasaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp1.604.369.321,86. Mengakomodir 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. Terdiri dari Solenja Model sebesar Rp80.717.100,00 dan Solenja Sarang dan Jasa sebesar Rp1.714.320.321,00.
6. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp802.626.377,00. Mengakomodir 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

B. UNIT BALAI PEMULIAAN IKAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi sebesar Rp1.816.593.000,00 terdiri Solenja Model sebesar Rp1.075.000.000,00 dan Solenja Sarang dan Jasa sebesar Rp841.593.000,00. Terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 11 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp2.409.763.100,00. Mengakomodir 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Terdiri dari Solenja Model sebesar Rp314.979.000,00 dan Solenja Sarang dan Jasa Rp1.694.682.400,00.

C. UNIT LABORATORIUM PENJUALAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPHMF)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi sebesar Rp876.969.933,00, terdiri Solenja Sarang dan Jasa sebesar Rp510.070.000,00. Terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. Program fungulsikan dan Pemusatan Hasil Perikanan. Dari alokasi Pagu Indikatif dan setelah verifikasi RENJA pagu program menjadi Rp166.294.243,00, mengalokasikan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Dimana pagu ini diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Pokokan Maja Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut pada tabel di bawah ini:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Uraian Kegiatan	Kategori Kegiatan	Sub Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Kategori Kegiatan	Sub Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Kategori Kegiatan	Sub Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan
						Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)					Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Nr.	Umsatzsteuer				Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer			Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer			Umsatzsteuer
	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer			Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer			Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

No	Uraian Kegiatan Kategori Kegiatan Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja		Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
		Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan				Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Tipe Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Rencana Pelaksanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Rencana Pelaksanaan			Jumlah Kegiatan
						Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan				Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Item					Country, State, District, Municipality, Province, Region	Indicators Group		Unit	Value	Indicator Periodicity			Unit	Value	Unit	Value	Indicator Sub-Periodicity			Unit	Value
						Indicator	Indicator			Indicator	Indicator	Indicator					Indicator	Indicator	Indicator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Kode	Kategori Program Kategori Sub Program Kategori Kegiatan				Kategori Kegiatan		Kategori Sub Kegiatan	Kategori Output			Kategori Indikator	Kategori Sub Indikator	Kategori Target			Kategori Realisasi	
								Kategori	Kategori	Kategori			Kategori	Kategori	Kategori		Kategori
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

No	Jenis Kegiatan Kategori Kategori Kategori	Indikator Kinerja		Uraian Kegiatan	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja			Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja			Kategori Kegiatan
		Kuantitas	Kualitas			Kuantitas	Kualitas	Kuantitas			Kualitas	Kuantitas	Kualitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

[illegible]

Name					Lernaktivitäten Lernaktivitäten Lernaktivitäten Lernaktivitäten Lernaktivitäten	Lernaktivitäten		Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten			Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Lernaktivitäten	Lernaktivitäten			Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten								Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	Lernaktivitäten	L

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item	Country Name Administrative Region Region Region				Indicator Group		Indicator	Unit	Indicator Description			Indicator	Unit	Indicator	Unit	Indicator Description			Indicator	Unit		
					Indicator Group	Indicator			Indicator	Indicator	Indicator					Indicator	Indicator	Indicator			Indicator	Indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Kategori Usaha	Kode Usaha	Kode Lokasi	Kategori Usaha			Kode Usaha	Kode Lokasi	Kategori Usaha			Kode Usaha	Kode Lokasi	Kode Usaha
						1	2	3			4	5	6			
1	PT. ABC	Perdagangan	Perdagangan	11	11				11	11				11	11	11
2	PT. DEF	Perdagangan	Perdagangan	11	11				11	11				11	11	11
3	PT. GHI	Perdagangan	Perdagangan	11	11				11	11				11	11	11
4	PT. JKL	Perdagangan	Perdagangan	11	11				11	11				11	11	11
5	PT. MNO	Perdagangan	Perdagangan	11	11				11	11				11	11	11

No				Lokasi Tempat Kegiatan Materi dan Pembicara Judul	Jenis Kegiatan		Jenis Organisasi	Jenis Materi	Materi Pokok Bahasan			Jumlah Peserta	Jumlah Pembicara	Materi Pokok Bahasan			Jumlah Peserta
					Sub Judul	Sub Judul			Sub Judul	Sub Judul	Sub Judul			Sub Judul			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

[illegible]

No	Uraian Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja		Sasaran Kegiatan	Tipe Kegiatan	Indikator Kinerja			Sasaran Kegiatan	Tipe Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Tipe Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Tipe Kegiatan
		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Penyusunan, 2022

Revisi

Revisi

Revisi

Revisi

Revisi

Revisi

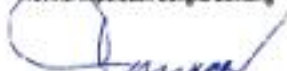
BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi hal yang sangat penting artinya dalam mengoptimalkan berbagai persoalan yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Output dari Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah program kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penempatan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dinas serta arah kebijakan pembangunan provinsi yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Tahun 2025. Renja juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikianlah Rencana Kerja ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PP Tahun 2025.

Pangkalpinang, Juli 2024

Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197308091993031002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. PULAU BANGKA KEL. AIR ITAM PANGKALPINANG